

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsip Watampore, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010..
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Aridal Nova Daltim , *Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kantor ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2021
- Aris Mutoyo, *Bantuan hukum ASN dlm perspektif UU 5-2014*, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian, Jurnal Cilvil Apparatus, Nomor: 022-Agustus 2018.
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- D.Schaffmeister, N.Keijzer,dkk, Terjemahan J.E.Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana* Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung.2007
- Dahlia Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Doni Wiranata, Zuhdi Arman, *Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan Pelanggaran Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Di Indonesia*, Program Studi Ilmu Hukum, Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurnal Malaka Law Review, 1 (2), 2024.
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994.
- H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan Sigid Suseno, S.H., M.Hum. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2015.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Hasbullah, *Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Jakarta, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 1, April 2017.
- J.A.A. Deining *On Reasonable Liability: A Comparison of Dutch and Canadian Law Regarding The Limit of Criminal Liability* Amhem: Guada Quint bv, 1982
- Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012
- Kusnu Goesniadhio Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2020.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Gajah mada, 1995
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP, 2004
- N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2011
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media Salatiga, 2011.
- Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, jurnal Al-Qadāu Volume 9 Nomor 1, Juni Tahun 2022.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. 1984
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2005.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 2002.
- Roscoe Pound, *An Introduction to Philosophy of Law New Brunswick*: Transaction Punishers, 1922.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000
- Stephen et.al mengutip R.A. Druft: *Acting, Trying and Criminal Liability dalam Action and Value in Criminal Law Oxford*: Claredon Press, 1993
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987/1988.
- Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*, Jurnal, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Kencana Pustaka, 2019
- Wirdjono Prodjodikoro, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1976.
- _____, *Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 mengenai Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri.*
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.*
- _____, *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 180/6871/SJ mengenai Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi*, 10 September 2018
- _____, *Undang undang (UU) Nomor 48 Th 2009 tentang Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman*
- _____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- _____, *Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- _____, *Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum

_____, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir
3a dan 3c

